

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Kesejahteraan Sosial**

##### **2.1.1 Definisi Kesejahteraan Sosial**

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu program yang terorganisir dan sistematis yang dilengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan suatu konsep yang relatif berkembang, terutama di negara-negara berkembang. Masalah sosial merupakan suatu permasalahan yang sudah lama sepanjang kehidupan manusia. Negara-negara maju dan negara industri sekarang ini, masalah sosial di rasakan sangat berat dan mengganggu perkembangan masyarakat, sehingga diperlukan sistem pelayanan sosial yang teratur. Menurut Friedlander dalam Fahrudin (2014:9) bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah:

Sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pertolongan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan kesehatan, standar kehidupannya dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial baik pribadi maupun kelompok dimana kebutuhan keluarga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Definisi kesejahteraan sosial menurut Suharto, (2010:3) adalah sebagai berikut:

Kesejahteraan Sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktifitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu.

Definisi tersebut menggambarkan kesejahteraan sosial adalah suatu lembaga sosial yang beraktifitas atau lembaga sosial yang berperan penting dalam mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusinya dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh setiap individu, kelompok, dan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat baik itu materil, spiritual sehingga akan mendorong masyarakat menuju kearah kualitas hidup yang lebih baik dan mencapai fungsi sosialnya, apabila pemenuhan kebutuhan tadi semuanya sudah tercekupi. Dalam hal ini tanggung jawab pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat harus ditingkatkan menjadi lebih baik.

### **2.1.2 Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Tujuan kesejahteraan sosial yaitu untuk dapat mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok dan masyarakat dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan mengurangi tekanan dan goncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial menurut Schneiderman dalam Fahrudin (2012:10) adalah sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan sistem
- b. Pengawasan sistem

### c. Perubahan sistem

Penjelasan yang pertama, yakni pemeliharaan sistem adalah pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat seperti definisi makna dan tujuan hidup, motivasi, dan pelaksanaan norma peranan. Penjelasan yang kedua, yakni pengawasan sistem adalah melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Penjelasan yang ketiga, yakni perubahan sistem adalah mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat.

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 pasal 3 bahwa tujuan penyelenggara kesejahteraan sosial sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggara kesejahteraan sosial
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan

Penjelasan yang pertama adalah tercukupinya kebutuhan dasar dalam menjalankan kelangsungan hidup seperti, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Penjelasan yang kedua adalah pengembalian fungsi sosial yang ada didalam masyarakat jika terdapat masalah-masalah sosial. Penjelasan yang ketiga

adalah menjaga dan mempertahankan kesejahteraan sosialnya pada saat mempunyai permasalahan dan masalah tersebut bisa dicegah dan ditangani. Penjelasan yang keempat adalah meningkatkan pengetahuan dan peduli kepada orang-orang yang mempunyai masalah sosial untuk ditangani. Penjelasan yang kelima adalah meningkatkan kualitas terlaksananya kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang mempunyai masalah sosial.

### **2.1.3 Fungsi-Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Fungsi utama kesejahteraan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat agar tercapainya kehidupan yang layak. Fungsi Kesejahteraan sosial lainnya yaitu untuk meningkatkan pembangunan sosial, perlindungan sosial, membangun masyarakat, dan memberdayakan masyarakat dalam tujuannya yaitu usaha kesejahteraan sosial dalam skala pembangunan sosial.

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlander dan Apte, (1982) dalam Fahrudin, (2012: 12) adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Pencegahan (*preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.

b. Fungsi penyembuhan (*curative*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

c. Fungsi Pengembangan (*development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi Penunjang (*supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial.

#### **2.1.4 Bidang-Bidang Kesejahteraan Sosial**

Secara konvensional ada beberapa bidang yang masuk dalam bidang kesejahteraan sosial, karena bidang kesejahteraan sosial cakupannya sangat luas. Dalam arti sempit dijelaskan menurut Fink (1974), Friedlander (1980), Mendoza (1981), dan Zastrow (1996) dalam Isbandi (2005: 128), antara lain meliputi:

- a) Bidang yang terkait dengan Sistem Penyampaian Layanan (Service Delivery System).
- b) Bidang yang terkait dengan Layanan Sosial terhadap Keluarga.
- c) Bidang yang terkait dengan Pelayanan terhadap Anak-Anak dan Generasi Muda.
- d) Bidang yang terkait dengan Kesejahteraan Sosial untuk Lanjut Usia (Lansia).
- e) Bidang yang terkait dengan Kelompok Khusus.
- f) Bidang yang terkait dengan Jaminan Sosial (Bantuan Sosial dan Asuransi Sosial).
- g) Bidang yang terkait dengan Pengentasan Kemiskinan.
- h) Bidang yang terkait dengan Perumahan dan Lingkungan Sosial.

- i) Bidang yang terkait dengan Layanan Kesehatan Masyarakat.
- j) Bidang yang terkait dengan Perawatan Medik.
- k) Bidang yang terkait dengan Layanan Kesehatan Jiwa.
- l) Bidang yang terkait dengan Lembaga Koreksional.
- m) Bidang yang terkait dengan Lembaga Pendidikan.
- n) Bidang yang terkait dengan Area Lain.

## **2.2 Tinjauan Usaha Kesejahteraan Sosial**

### **2.2.1 Definisi Usaha Kesejahteraan Sosial**

Pengertian kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas biasanya disebut sebagai usaha kesejahteraan sosial. Suharto (2010:4) mendefinisikan usaha kesejahteraan sosial yaitu: “Usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial”. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, usaha kesejahteraan sosial merupakan bentuk intervensi pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ada pun Usaha Kesejahteraan Sosial menurut Undang-undang NO. 6 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 sebagai berikut: “Usaha-usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan mengembangkan kesejahteraan sosial”. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa usaha kesejahteraan sosial mengacu pada program, pelayanan dan berbagai kegiatan yang secara kongkret (nyata) berusaha menjawab kebutuhan ataupun masalah yang dihadapi anggota masyarakat

### **2.2.2 Tujuan Usaha Kesejahteraan Sosial**

Tujuan usaha kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Menurut Suharto (2010:4), tujuan usaha kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan standar hidup

Meningkatkan standar hidup melalui adanya pelayanan sosial dan jaminan sosial untuk semua lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang sangat memerlukan perlindungan sosial.

b. Peningkatan keberdayaan

Meningkatkan keberdayaan, melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi sosial, dan politik yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat kemanusiaan.

c. Penyempurnaan kebebasan

Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan

### **2.2.3 Fokus Utama Usaha Kesejahteraan Sosial**

Merujuk pada definisi welfare dari Howard Jones (1990) dalam Suharto (2010:8), “Tujuan utama usaha kesejahteraan sosial yang pertama dan utama, adalah penanggulangan kemiskinan dalam berbagai manifestasinya”. Makna “kemiskinan dalam berbagai manifestasinya” tidak hanya menunjuk pada “kemiskinan fisik”, seperti rendahnya pendapatan atau rumah tidak layak huni, melainkan pula mencakup bentuk masalah sosial yang terkait dengannya, seperti anak jalanan, pekerja anak,

perdagangan manusia, pelacuran, pengemis, pekerja migran, dan sebagainya. Suharto (2010:9) mengungkapkan bahwa: “Usaha kesejahteraan sosial memfokuskan kegiatannya pada tiga bidang, yaitu: pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat”. Maksudnya, usaha kesejahteraan berfokus pada beberapa pelayanan yang ada pada pemerintah seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan.

## **2.3 Tinjauan Tentang Pelayanan Sosial**

### **2.3.1 Definisi Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial merupakan pelayanan yang memberikan bantuan kepada individu, kelompok dan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial baik di luar maupun dari dirinya. Pelayanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang dalam memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia. Pelayanan sosial menurut Khan dalam Fahrudin, (2012:51) adalah:

Pelayanan Sosial adalah konteks kelembagaan yang sebagai terdiri atas program-program yang disediakan berdasarkan kriteria selain kriteria pasar untuk menjamin tingkatan dasar dari penyediaan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan, untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan keberfungsian individual, untuk memudahkan akses pada pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga pada umumnya, dan untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan.

Pelayanan sosial dapat dicapai dengan cara yang bersifat informasi, bimbingan dan pertolongan dapat dicapai dengan cara yang bersifat informasi, bimbingan dan pertolongan melalui berbagai bentuk kegiatan yang berkenaan dengan pemecahan masalahnya.



### 2.3.2 Bidang-bidang Pelayanan Sosial

Menurut Suharto (2013: 14) dalam suatu pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat setidaknya terdapat 5 bidang pelayanan sosial, pelayanan-pelayanan sosial itu antara lain :

a. Jaminan Sosial

Merupakan sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan

b. Pelayanan Perumahan

Jaminan yang disediakan oleh pemerintah ini adalah perumahan publik atau perumahan sosial. Selain menyediakan rusunawa atau RSS.

c. Kesehatan

Pelayanan kesehatan publik juga sebagian besar diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Skema pelayanan kesehatan publik biasanya erat kaitannya dengan sistem jaminan sosial, terutama asuransi sosial, karena sebagian pelayanannya menyangkut atau berbentuk asuransi kesehatan.

d. Pendidikan

Negara memiliki tiga kewajiban penting dalam bidang pendidikan. Pertama, sebagai penyedia utama lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah, akademik dan universitas. Kedua, sebagai regulator atau pengatur penyelenggaraan pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta maupun lembaga-lembaga non formal. Ketiga, fasilitator dalam penyediaan infrastruktur pendidikan, termasuk di dalamnya penyedia skema-skema

beasiswa dan tunjangan-tunjangan pendidikan bagi siswa-siswa yang beprestasi dan atau tidak mampu.

e. Pelayanan sosial personal

Pelayanan ini menunjuk pada berbagai bentuk perawatan sosial diluar pelayanan kesehatan, pendidikan dan jaminan sosial. Dalam garis besar pelayanan ini mencakup tiga jenis :

1. Perawatan anak
2. Perawatan masyarakat, dan
3. Perawatan peradilan kriminal

## **2.4 Tinjauan Tentang Masalah Sosial**

### **2.4.1 Definisi Masalah Sosial**

Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, masalah tersebut merupakan personal karena menyangkut tata kelakuan immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Oleh sebab itu masalah-masalah sosial tak akan memungkinkan ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Menurut Kartini Kartono dalam bukunya Patologi Sosial (2008:2) yang disebut Masalah Sosial sebagai berikut :

- a. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup masyarakat.
- b. Situasi sosial yang dianggap sebgaiian besar warga masyarakat, sebagian mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.

Sangat jelas adat istiadat mempunyai nilai pengontrolan dan nilai sanksional terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Oleh karena itu tingkah laku yang dianggap melanggar norma dan adat, atau berintergrasi dengan tingkah laku umum dapat dianggap sebagai masalah sosial. Sedangkan menurut Soetarso dikutip oleh Huraerah (2011:4) adalah sebagai berikut :

Masalah sosial merupakan kondisi sosial yang dinilai orang sebagai kondisi yang tidak enak. Masalah atau tindaknya suatu kondisi sosial bergantung orang atau pihak yang memberikan penilaian. Suatu masalah sosial akan lebih sulit penanggulangannya kalau lebih banyak orang menilainya tidak sebagai masalah.

Dari definisi masalah sosial di atas dapat disimpulkan, suatu kondisi sosial masyarakat dapat dianggap sebagai masalah apabila masyarakat tersebut menganggap kondisi itu sebagai masalah yang harus segera diselesaikan. Menurut Parillo yang dikutip Soetomo dalam Huraerah (2011:5) yang menyatakan untuk dapat memahami pengertian masalah sosial perlu memperhatikan 4 komponen, yaitu :

- a. Masalah itu bertahan untuk satu periode tertentu.
- b. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau mental baik pada individu maupun masyarakat.
- c. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
- d. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Dari keempat komponen tersebut terdapat keterkaitan diantara satu dengan yang lain, masalah sosial bertahan diwaktu tertentu, dirasakan banyak orang, menimbulkan kerugian dan barulah membutuhkan solusi untuk memecahkan masalah sosial tersebut. Didalam setiap kehidupan lingkungan masyarakat baik itu individu atau kelompok pasti terdapat suatu perbedaan antara satu dengan yang lainnya dan hal-hal

tersebut akan mengacu pada suatu permasalahan yang akan timbul didalam suatu kelompok atau individu, dengan kata lain adanya suatu perselisihan akan menimbulkan suatu permasalahan yang baru.

Masalah sosial tentunya dialami semua makhluk sosial, tidak memilih usia ataupun jenis kelamin. Mulai dari orang dewasa sampai anak-anak rentan sekali mengalami permasalahan, mereka melalui masa-masa sulit dalam proses perkembangannya.

Robert K. Merton yang dikutip oleh Huraerah (2011:5), mendefinisikan masalah sosial dengan menyebutkan ciri-ciri pokok masalah sosial. Baginya, ciri-ciri masalah sosial itu adalah adanya “jurang perbedaan yang cukup signifikan antar standar-standar sosial dengan kenyataan sosial”. Oleh karena itu, menurut Merton Masalah Sosial selalu mengacu pada jurang antara harapan-harapan yang ada, baik pada seseorang individu maupun suatu kelompok, dengan kenyataan-kenyataan mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang dapat dipenuhi, nilai-nilai dan tujuan-tujuan apa yang bisa tercapai, bagaimana seseorang seharusnya bertindak dan apa yang dapat diperoleh orang dalam suatu masyarakat. Dari definisi diatas sudah sangat jelas bahwa masalah sosial adalah suatu kondisi yang dimana antara keninginan dan harapan tidak sesuai.

#### **2.4.2 Karakteristik Masalah Sosial**

Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai norma yang bersangkutan paut dengan

kesejahteraan, kesehatan fisik, kesehatan mental serta penyesuaian diri individu atau kelompok sosial.

Menurut Horton dan Leslie yang dikutip Suharto (2010:83), menyatakan masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi secara kolektif. Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa masalah sosial memiliki karakteristik sebagai berikut :

a) Kondisi yang dirasakan banyak orang

Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai beberapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapatkan perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial. Peran media masa sangat menentukan apakah masalah tertentu menjadi pembicaraan khalayak umum. Jika sejumlah artikel atau berita yang membahas suatu masalah muncul di media massa, masalah tersebut akan segera menarik perhatian orang. Kasus kriminalitas akhir-akhir ini sangat ramai diberitakan dikoran maupun televisi. Kriminalitas adalah masalah sosial.

b) Kondisi yang dinilai tidak menyenangkan

Menurut paham hedonisme, orang cenderung mengulai sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang senantiasa menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan peran masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai

masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial pleg masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya. Ukuran ‘baik’ atau ‘buruk’ sangat bergantung pada nilai atau norma yang dianut masyarakat. Penggunaan narkoba, minuman keras, homoseksual, bahkan bunuh diri adalah masalah sosial, apabila nilai atau norma masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang buruk atau bertentangan dengan aturan-aturan umum.

c) Kondisi yang menuntut pemecahan

Suatu kondisi yang idak menyenangkan senatiasa menuntut pemecahan. Bila seseorang merasa lapar akan segera dicarinya rumah makan, umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasakan bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan.

d) Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif

Masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah sosial individual dapat diatasi secara perorangan atau satu persatu. Tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial (*social engineering*) seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

Akar masalah sosial di Indonesia pada dasarnya sama dengan berbagai negara-negara lain. Akar masalah sosial bermula dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk baik yang miskin menjadi akar masalah sosial. Jumlah penduduk menentukan permasalahan-permasalahan sosial yang baru muncul seperti tingkat pendidikan dan

kesehatan yang rendah dan lain-lain. Kesenjangan yang lebar antara pemerintah dan masyarakat menjadi masalah yang dapat memicu tidak terselesaikan masalah-masalah sosial yang ada. Pemerintah menjadi tempat masyarakat mengadu masalah-masalah yang sedang terjadi di kalangan masyarakat, dan pemerintah mempunyai peran penting untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di kalangan masyarakat tersebut.

## **2.5 Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial**

### **2.5.1 Definisi Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial suatu profesi pelayanan kepada manusia (individu, kelompok, dan masyarakat dalam memberikan pelayanan profesionalnya, pekerja sosial dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan ilmiah mengenai *Human Relation* (relasi antar manusia). Tujuan dari pekerja sosial adalah untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat agar dapat memecahkan masalahnya. Masalah yang dapat timbul karena kebutuhan, rintangan dan ketidak berfungsi sosial. Definisi Pekerjaan Sosial menurut Zastrow (1999) dalam Huraerah (2011:38), adalah sebagai berikut :

Aktifitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Definisi di atas bahwa pekerjaan sosial erat kaitannya dengan kegiatan untuk membantu menolong dari masalah sosial yang dihadapi individu atau kelompok maupun masyarakat untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya agar dapat menjalankan fungsi dan tugas hidupnya di dalam lingkungan masyarakat tempat

tinggalnya. Pekerjaan sosial suatu profesi pelayanan kepada manusia (individu, kelompok, dan masyarakat dalam memberikan pelayanan profesionalnya, pekerja sosial dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan ilmiah mengenai *Human Relation* (relasi antar manusia). Tujuan dari pekerja sosial adalah untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat agar dapat memecahkan masalahnya. Masalah yang dapat timbul karena kebutuhan, rintangan dan ketidakberfungsian sosial. Oleh sebab itu, relasi antar manusia merupakan inti dari profesi pekerjaan sosial.

Pekerjaan sosial mempunyai perhatian utama dalam meeningkatkan atau memulihkan keberfungsial sosial individu, kelompok, dan komunitas. Tidak hanya itu pekerjaan sosial memberikan pelayanan-pelayanan bagi individu atau kelompok tersebut dalam mewujudkan aspirasi-aspirasi mereka. dan pekerjaan sosial harus mengetahui perkembangan dan prilaku manusia baik interaksi dengan lingkungan sosialnya, sehingga bisa memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas kehidupan mereka.

### **2.5.2 Tujuan Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki dan mengembangkan interaksi antar orang, sehingga orang tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, mengatasi kesulitannya, dan mewujudkan aspirasi nilai-nilai yang ada di masyarakat.



Berdasarkan pernyataan tersebut, maka tujuan pekerjaan sosial menurut Dubois dan Miley (2005) dalam Suharto (2007:5), sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi, perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Berdasarkan penjelasan pertama adalah pekerja sosial harus bisa membangun kemampuan klien untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi. Penjelasan yang kedua pekerja sosial membantu menghubungkan klien ke pelayanan sosial lembaga untuk diberikan pemecahan masalahnya. Penjelasan yang ketiga adalah pekerja sosial menyampaikan masukan-masukan kepada pelayanan sosial lembaga untuk memperbaiki keefektifan pelayanan tersebut. Penjelasan keempat adalah pekerja sosial membantu mengembangkan dan memperbaiki kebijakan-kebijakan sosial, baik itu kebijakan pemerintah dan kebijakan pelayanan lembaga.

### **2.5.3 Keberfungsian Sosial**

Pekerjaan sosial berusaha untuk memperbaiki, meningkatkan atau mempertahankan keberfungsian sosial orang, kelompok, dan masyarakat, menurut Siporin (1975) dalam Fahrudin (2012:62) keberfungsian sosial merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas seperti keluarga, perkumpulan, komunitas, dan sebagainya berperilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka.

karena orang berfungsi dalam arti peranan-peranan sosial mereka, maka keberfungsian sosial menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dipandang pokok untuk pelaksanaan beberapa peranan yang, karena keanggotaanya dalam kelompok-kelompok sosial setiap orang diminta melakukannya.

Penjelasan di atas keberfungsian sosial merupakan peranan-peranan individu, kelompok, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupan. Menurut Suharto (2005:27) kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan meningkatkan keberfungsian sosial dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
2. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh berbagai sumber, pelayanan dan kesempatan.
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas dan berperikemanusiaan.
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Berdasarkan pernyataan di atas bagaimana seorang pekerjaan sosial harus bisa memperbaiki fungsi sosial seseorang dan membantu memecahkan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pelayanan sosial dengan baik.

#### **2.5.4 Metode Pekerjaan Sosial**

Metode Pekerjaan Sosial adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan dilaksanakan secara sistematis digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan

pelayanan sosial. Dalam pekerjaan sosial ada beberapa metode yang digunakan untuk membantu klien dalam mengatasi permasalahannya. Penanganannya dari permasalahan individu, kelompok, dan masyarakat. Metode yang digunakan oleh peksos sebagai berikut :

a. Bimbingan Sosial Perorangan (*Social Case Work*)

Bimbingan sosial perorangan menurut Swift yang dikutip oleh Muhudin (1992:11) adalah seni untuk membantu individu dalam mengembangkan dan menggunakan kemampuan pribadinya untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan sosialnya.

Berdasarkan definisi di atas metode ini diperuntukkan kepada seorang individu yang dalam kehidupannya mengalami masalah sosial. Seorang pekerja sosial harus bisa menangani masalah yang didapat individu tersebut melalui pendekatan untuk mengembangkan dan memecahkan masalah individu tersebut. Dalam memecahkannya seorang peksos harus mempunyai keahlian dan keterampilan dalam relasi pekerja sosial dengan klien. Prinsip dasar pada bimbingan sosial perseorangan adalah:

1. Penerimaan, seorang pekerja sosial harus mau menerima dan menghormati penerima pelayanan (klien) dalam setiap kondisi yang dialaminya.
2. Komunikasi, antara pekerja sosial dan klien harus saling memberi dan menerima informasi.

3. Individualisasi, pekerja sosial harus memahami, menerima bahwa klien sebagai pribadi yang unik, dalam arti berbeda antara individu yang satu dengan individu lainnya.
  4. Partisipasi, pekerja sosial harus ikut serta secara langsung dalam membantu mengatasi permasalahan klien.
  5. Kerahasiaan, pekerja sosial harus mampu merahasiakan informasi yang diberikan oleh klien.
  6. Kesadaran diri, sebagai manusia pekerja sosial menyadari akan respon klien serta motivasi dan relasi bantuan profesional.
- b. Bimbingan Sosial Kelompok (*Social Group Work*)

Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. Jadi bimbingan sosial kelompok digunakan untuk membantu individu dalam mengembangkan atau menyesuaikan diri dengan kelompok/lingkungan sosialnya dengan kondisi tertentu atau membantu kelompok mencapai tujuannya. Bimbingan sosial kelompok menurut Tacter yang dikutip oleh Muhidin (1992:11) menyatakan bahwa :

Bimbingan sosial kelompok adalah suatu metode dimana individu-individu kelompok dari lembaga sosial dibantu oleh seorang pekerja sosial atau petugas yang membimbing interaksi didalam program kegiatan sehingga mereka dapat menghubungkan diri dengan satu yang lain dan kesempatan untuk mengembangkan pengalamannya selaras

dengan kebutuhan dan kemampuan mereka untuk tujuan mengembangkan individu, kelompok dan masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas individu-individu yang mempunyai permasalahan yang sama dibentuk menjadi kelompok. Pekerja sosial membimbing kelompok tersebut untuk mengembangkan interaksi satu sama lain sehingga terciptanya keselarasan kebutuhan yang ingin dipenuhi kelompok tersebut dalam pemecahan masalahnya. Prinsip dasar pada bimbingan sosial kelompok adalah :

1. Pembentukan kelompok secara terencana. Kelompok merupakan satu kesatuan dimana individu memperoleh pelayanan untuk mengembangkan pribadinya. Kelompok yang telah terbentuk, maka badan sosial yang menerima kelompok dimaksud perlu memperhatikan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan situasi kelompok, terutama yang dapat memberikan kemungkinan untuk perkembangan individu menuju ke arah positif dalam pemenuhan kebutuhan yang diinginkan oleh kelompok.
2. Memiliki tujuan yang akan dicapai bersama. Di dalam bimbingan sosial kelompok tujuan, perkembangan individu dan kelompok harus dirumuskan dengan cermat oleh pembimbing kelompok agar terdapat keserasian antara harapan dan kemampuan kelompok.
3. Penciptaan interaksi terpinpin. Dalam bimbingan sosial kelompok harus dibina hubungan yang bertujuan antara pekerja sosial dengan anggota-anggota kelompok

dan atas dasar keyakinan bahwa pekerja sosial akan menerima anggota kelompok sebagaimana adanya.

4. Pengambilan keputusan. Kelompok harus dibantu dalam mengambil keputusan-keputusan sendiri dan menentukan kegiatan yang diinginkan sesuai dengan kemampuannya.
5. Organisasi bersifat fleksibel dalam arti organisasi dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Organisasi yang formal harus fleksibel dan harus didorong bila sedang berusaha mencapai tujuan yang penting, yang dipahami oleh para anggotanya dan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.
6. Penggalan sumber-sumber dan penyusunan program. Sumber yang ada di masyarakat harus dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman kelompok, untuk dimanfaatkan para anggota dan kelompok itu sendiri. Penilaian kegiatan secara terus-menerus terhadap proses dan hasil program atau pekerjaan kelompok yang merupakan jaminan dan pertanggungjawaban terhadap apa yang diselesaikan masing-masing pihak untuk keseluruhan.

c. Bimbingan Sosial Masyarakat

Bimbingan sosial dengan masyarakat sebagai salah satu metode pekerjaan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat serta menekankan dengan adanya prinsip peran serta atau partisipasi masyarakat. Upaya tersebut cenderung mengarah pada pemenuhan kebutuhan bidang tertentu di masyarakat

seperti kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak dan lain sebagainya. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah:

1. Menyusunan program didasarkan kebutuhan nyata yang mendesak di masyarakat.
2. Partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat.
3. Bekerja sama dengan berbagai badan dalam rangka keberhasilan bersama dalam pelaksanaan program.
4. Titik berat program adalah upaya untuk pencegahan, rehabilitasi, pemulihan, pengembangan dan dukungan.

#### **2.5.5 Fungsi dan Tugas Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial di dalam pencapaian tujuan, yaitu memecahkan permasalahan sosial yang ada di masyarakat maupun dalam menghubungkan orang dengan sistem sumber, perlu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai pekerja sosial. Tugas pekerjaan sosial menurut Schwartz (1961:157-158) dalam Suharto (2010:69), yaitu sebagai berikut :

- a. Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka
- b. Mendeteksi dan megahadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh terhadap mereka
- c. Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, faka, nilai, konsep yang tidak dimiliki masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi realita sosial dan masalah yang dihadapi mereka
- d. Membagi visi kepada masyarakat

- e. Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk

Berdasarkan definisi di atas bahwa fungsi dan tugas pekerja sosial yang berhubungan dengan pemberdayaan terhadap kemampuan sdm adalah pekerja sosial harus mampu mendeteksi kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat dan mencari peluang bersama masyarakat agar pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri dapat tercapai.

## **2.6 Tinjauan Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat**

### **2.6.1 Definisi Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat yang lemah. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu-individu yang ada didalam masyarakat agar terciptanya pembangan masyarakat. Menurut Parsons, et.al 1994 dalam Soeharto (2010:58-59) pemberdayaan adalah: “Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.”

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pemberdayaan menunjukan proses dimana seseorang memperoleh kekuatan, akses pada sumber-sumber, serta pengembangan keterampilan. Dalam hal ini pemberdayaan terdapat pendidikan, pelatihan, evaluasi hasil pembelajaran dan pendampingan usaha agar segala potensi kemandirian yang dimiliki oleh individu, kelompok maupun masyarakat berdayaguna



baik dari sisi ekonomi, sosial, dan politik. Pemberdayaan diberikan kepada individu atau kelompok yang lemah agar memiliki kekuatan dan kemampuan.

### **2.6.2 Definisi Program Pemberdayaan Masyarakat**

Program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang memiliki tujuan untuk meningkat kemampuan individu atau kelompok agar dapat mandiri untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Program ini dilaksanakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan LOEN Kota Bandung. Definisi program pemberdayaan adalah : “Program pelayanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang-peluang usaha yang ada dimasyarakat”.

Program pemberdayaan ini merupakan program belajar jangka pendek yang dilakukan secara efektif dan efisien, karena dengan waktu belajar yang relatif singkat peserta didik dapat dengan cepat menguasai kecakapan hidup dibidang menjahit pakaian/tata busana. Materi ajar yang diberika meluputi teori penunjang dan keterampilan serta materi praktek sesuai dengan tingkatannya. Secara keseluruhan materi teori adalah 30% dan praktek 70%.

Program pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada dimasyarakat khususnya masalah pengangguran agar masyarakat dapat berdayaguna. Program ini diberikan terhadap masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan kemampuan. Program ini secara konsisten dilaksanakan rutin setiap tahunnya oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan LOEN Kota Bandung.

### **2.6.3 Tujuan Program Pemberdayaan**

Tujuan dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat pada dasarnya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan khusus sebagai berikut:

1. Memberikan bekal pengetahuan usaha khususnya dalam bidang menjahit
2. Memberikan bekal keterampilan dalam bidang menjahit
3. Menanamkan pola pikir dan sikap usaha
4. Dapat menciptakan lapangan pekerjaan

### **2.6.4 Kriteria Penerima Program Pemberdayaan Masyarakat**

Sasaran penerima bantuan program Pemberdayaan Masyarakat adalah calon peserta didik yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berusia 16 - 40 tahun, prioritas keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- b. Putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan (tidak sedang menempuh pembelajaran di sekolah/kuliah atau program pendidikan kesetaraan), kecuali Paket C Vokasi dan belum pernah mengikuti program sejenis
- c. Tidak sedang mengikuti program pendidikan dan pelatihan sejenis yang dibiayai dari APBN/APBD;
- d. Memiliki kemauan untuk mengikuti program pembelajaran hingga selesai dan mengembangkan rintisan usaha

### **2.6.5 Persyaratan Penerima Program Pemberdayaan Masyarakat**

Persyaratan untuk menjadi penerima program pemberdayaan di Lembaga Kursus dan Pelatihan LOEN Bandung adalah:

1. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan
2. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) domisili Kota Bandung
3. Melampirkan Kartu Keluarga
4. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

## **2.7 Tinjauan Tentang Kemampuan**

### **2.7.1 Definisi Kemampuan**

Kemampuan merupakan salah satu unsur dalam kematangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Kemampuan menunjukkan potens orang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan. Menurut Robbins, dalam Robbins dan Judge (2014;52) kemampuan adalah: “Kapisitas individu untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan pada dasarnya terdiri dari dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan merupakan modal utama dalam bekerja. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan seorang individu dalam menguasai suatu keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.

### **2.7.2 Faktor Kemampuan**

Menurut Robbins, dalam Robbins dan Judge (2014;52) kemampuan dibagi menjadi 2 faktor, yaitu:

1. Kemampuan intelektual

Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental berpikir, menalar, dan memecahkan masalah. Individu dalam sebagian masyarakat menempatkan kecerdasan, dan untuk alasan yang tepat, pada nilai yang tinggi. Individu yang cerdas juga lebih mungkin menjadi pemimpin dalam suatu kelompok.

Tujuh dimensi yang paling sering disebutkan yang membentuk kemampuan intelektual adalah : kecerdasan angka, pemahaman verbal, kecepatan persepsi, penalaran induktif, penalaran deduktif, visualisasi spasial dan daya ingat.

2. Kemampuan Fisik

Kemampuan fisik adalah kemampuan tugas-tugas yang menuntut stamina, ketrampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Penelitian terhadap berbagai persyaratan yang dibutuhkan dalam ratusan pekerjaan telah mengidentifikasi sembilan kemampuan dasar yang tercakup dalam kinerja dari tugas-tugas fisik.

## **2.8 Tinjauan Tentang Sumber Daya**

### **2.8.1 Definisi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya. Sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Menurut Fathoni, dalam Fathoni (2009:34) sumber daya manusia adalah: “modal dan kekayaan paling penting dari setiap aktivitas maupun kegiatan manusia.”

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa sumber daya manusia sangatlah penting dan dibutuhkan dalam berbagai kegiatan. Sumber daya manusia yang diberdayakan dengan baik akan menghasilkan manusia yang berkualitas. Untuk itu pemberdayaan sumber daya manusia perlu dimaksimalkan agar menjadi sumber daya manusia yang potensial.